

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan menurut beberapa ahli :

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Poerwadarmita (dalam bukharistyle.blogspot.com :2012).Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan

kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik.

Pembinaan sebagai mana yang dimaksudkan dalam undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 60, pasal 61 dan pasal 62 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional. Serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yaitu :

1. Menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi yang ada di Kabupaten Kampar. Sub indikatornya adalah :
 - a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;

- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dengan badan usaha lainnya.
2. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi yang ada di Kabupaten Kampar. Sub indikatornya adalah :
- a. Membimbing koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. Mengembangkan dan membantu pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, dan penelitian Koperasi;
 - c. Memperkokoh permodalan Koperasi dan mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
 - d. Mengembangkan bidang usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi;
 - e. Memberi bantuan konsultasi guna membantu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.

Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

2. Jenis pembinaa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Kampar

1. Perencanaa Kas

Anggaran menunjukkan rencana aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan posisi kas akhir pada setiap periode. Pengelola koperasi harus menyusun rencana aliran kas baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pada dasarnya, anggaran kas terdiri dari dua bagian yaitu rencana

penerimaan kas dan rencana pengeluaran kas. Jika terjadi defisit kas, pengelola harus mencari alternatif sumber dana tambahan dan mencari alternatif penggunaan dana / investasi jika terjadi kelebihan kas.

Anggaran kas memiliki hubungan erat langsung dengan anggaran pendapatan , anggaran biaya, dan anggaran pengeluaran modal. Tujuan utama anggaran kas adalah

- a. Menunjukkan kemungkinan posisi kas sebagai akibat dari operasi usaha simpan pinjam.
- b. Identifikasi kemungkinan kekurangan dan kelebihan kas.
- c. Mengkoordinasi kas dengan jumlah modal kerja, penyaluran kredit, penerimaan tabungan, investasi dan hutang.
- d. Menentukan dasar yang sehat untuk pengendalian posisi kas secara terus menerus.

2. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan modal koperasi. modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, dan donasi jika ada. Simpanan sukarela tidak dimasukkan sebagai modal koperasi karena sifatnya yang setiap saat dapat diambil kembali oleh anggota. Dan, untuk dana – dana yang berasal dari pembagiam SHU, seperti dana pendidikan, dana pegawai, dan dana social dimasukkan sebagai hutang jangka pendek.

3. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu.

Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang memuat kebijakan akuntansi, yaitu kebijakan – kebijakan di bidang akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang memuat antara lain.

- a. Penetapan kebijakan pemberian pinjaman.
- b. Penetapan klasifikasi atas pinjaman yang diberikan
- c. Penetapan kebijakan penyisihan, taksiran pinjaman yang diberikan yang tidak dapat ditagih.
- d. Penetapan harga perolehan aktiva tetap termasuk kebijakan penyusutan.
- e. Kebijakan penetapan biaya termasuk kapitalisasi.

2.2 Konsep Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Kata “ koperasi ” berasal dari perkataan Co dan operation,yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan (Ganda,2008:1).

Menurut Hatta “bapak koperasi indonesia” koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong (dalam Sitio, 2001 :17). Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua buat orang.

Menurut Ninik Widayanti (dalam Buku Ginda, 2008 : 2) pengertian Koperasi memberikan paling tidak lima hal yaitu:

1. Rakyat merupakan adanya orang-orang yang kondisi ekonominya relatif lemah,yang perlu menghadapi golongan ekonomi kuat.
2. Koperasi memiliki watak sosial, hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama.Di dalam koperasi,anggota perkumpulan bekerjasama berdasarkan kesukarelaan,persamaan derajat (demokrasi, sosial ekonomi), persamaan hak dan kewajiban.Sesuai dengan Koperasi azas demokrasi,berarti koperasi adalah miik para anggota sendiri dan kekuasaan tertinggi dikuasai oleh semua anggota melalui rapat anggota.
3. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan yang sama, jadi masing-masing bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama,sehingga dalam koperasi tidak ad unsur paksaan
4. Koperasi merupakan memiliki badan hukum dan karena itu koperasi dapat juga beranggotakan badan hukum.Badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan kewajiban sebagai manusia biasa.
5. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi.Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapai kehidupan ekonomi yang

sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun masyarakat sekitar.

Menurut R.M Margono Djojohadikoesoemo Koperasi adalah Perkumpulan dari manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. (dalam buku Firdaus, Muhammad, 2002 :39)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.(UU no.25:1992 tentang perkoperasian)

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang, atau perkumpulan-perkumpulan Koperasi, yang secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kepentingan masing-masing. Anggota biasanya mempunyai potensi usaha yang terbatas sekali, karena itu mereka secara sukarela bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yang pada umumnya bersifat ekonomis. Perkelompokan koperasi, dengan demikian merupakan suatu kelompok orang-orang yang mempunyai maksud tujuan mengadakan usaha kepentingan bersama (Widiyanti, 2007:76).

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang mempunyai sifat gotong royong. Oleh karena itu, agar dalam pengelolaan berjalan dengan baik koperasi perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia. Berkembangnya sumber daya manusia sangat menentukan perkembangan organisasi koperasi (Suryani, 2008:115).

Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. (Sartika, Tiktik, 2009:13).

Koperasi merupakan suatu kumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan kepada kesejahteraan anggota harus benar-benar diperjuangkan. Suatu perkumpulan atau kerjasama antara beberapa orang dan badan hukum dapat dinamakan Koperasi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai perkoperasian.

Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan koperasi. (peraturan menteri no.14/per/M.KUKM/XII/2009)

Hendrojogi (2007:21) koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Koperasi merupakan adanya unsur sukarela dalam berkoperasi bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan, pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Menurut pendapat Tati Suhartati Joesron (2005:4) Koperasi adalah Suatu lembaga yang dirancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang sekaligus merupakan pemiliknya.

Koperasi merupakan Organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan di antara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Keanggotaan, karena itu dapat dilihat sebagai suatu keluasaan dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip

Sesungguhnya koperasi mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian Koperasi dinilai mampu memberikan kelebihan kepada para anggota atau masyarakat luas yang

memanfaatkan keberadaannya Undang-Undang No 17 Tahun 2012 diharapkan akan lebih bisa menjamin terwujudnya kehidupan koperasi seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ayat 1 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" jadi melalui kegiatan Koperasi dalam tatanan perekonomian nasional, diharapkan cita-cita bangsa diwujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat dicapai.

2. Jenis koperasi

Penjenisan koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara sebagai berikut : (Muhammad Firdaus, 2004 : 62)

1. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut.
 - a. Koperasi konsumen
Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usahapelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
 - b. Koperasi produsen;
Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
 - c. Koperasi jasa; dan
Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
 - d. Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

2. Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

a. Koperasi pegawai Negeri

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 4 april 1995 nama induk koperasi pegawai negeri Republik Indonesia (IKP-RI), perubahan nama dari koperasi pegawai negeri menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia dengan sendirinya diikuti oleh semua jenjang dibawahnya.

b. Koperasi angkatan darat (kopad) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para perwira yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya.

c. Koperasi angkatan udara (kopal) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para perwira angkatan udara yang berhubungan dengan pekerjaannya.

d. Koperasi angkatan laut (kopau) adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri para perwira angkatan laut yang berhubungan langsung dengan kepentingan

e. Koperasi angkatan kepolisian (koppol) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para polisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan dalam kepolisian.

3. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain sebagai berikut:

a. Koperasi desa /koperasi serba usaha

Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.

b. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi.

c. Koperasi pertanian

Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang kepentingan serta mata pencaharian berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.

d. Koperasi peternakan

Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan peternakan

e. Koperasi pertanian

Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tani dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan

f. Koperasi Simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung bidang perkreditan.

g. Koperasi asuransi

Koperasi asuransi adalah untuk menjamin kesejahteraan anggota

h. Koperasi perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang berkepentingan serta mata pemcahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan.

i. Koperasi unit desa (KUD)

Koperasi unit desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para produsen dan masyarakat desa yang bertujuan untuk menghasilkan produksi yang efisien dan efektif.

Dalam perkembangan terakhir sejak diberlakukan inpres No.18 Tahun 1998, maka berbagai macam/jenis koperasi bermunculan sesuai dengan aspirasi masyarakat,antara lain:

1. Koperasi pondok pesantren adalah koperasi yang anggota –anggota terdiri dari paraguru-guru pesantren dan para santri yang berhubungan langsung dengan pesantren
2. Koperasi wanita adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para wanita yang mempunyai kepentingan untuk bersama.
3. Koperasi pasar adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para pedagang maupun buruh yang mempunyai kepentingan langsung dengan mata pencahariannya.
4. Koperasi profesi adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para kalangan profesi seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter dan lain-lain yang mempunyai kepentingan langsung dengan profesinya.

3. Tujuan Koperasi

Dalam koperasi,pada dasarnya perjuangan keras itu tidak ada karena koperasi adalah bentuk kerja sama antara mereka yang sama tujuannya dan kepentingannya. Koperasi yang tidak dikemukakan oleh apa yang disebut bahasa jerman "Erwebsprinsip" melainkan oleh

“bedarfdeckungsprinzip”, bukan oleh cita-cita keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Memang, dalam kerja sama itu keuntungan dibutuhkan, tetapi keuntungan yang diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan demi semulanya melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan memperoleh keuntungan, baik itu karena dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu akan tetapi tidak apa, karena itu bukan yang diutamakan, melainkan melaksanakan keperluan bersama.

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, seperti berikut ini: (koerman, 2003 : 34).

1. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota
 - a. Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
 - b. Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
 - c. Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkatkan sifat demokrasi, dan mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.
2. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah

- b. Melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi)
 - c. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
 - d. Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia
3. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat
- a. Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi
 - c. Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi
 - d. Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya.

2.3 Konsep Koperasi dalam Undang-Undang No 17.Tahun 2012

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut,

keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi. Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat.

Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat

kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang.

Dalam Undang – undang No.17 Tahun 2012 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan,dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota, memberikan kemudahan, dan memberikan bimbingan. Adapun kemudahan dan bimbingan tersebut adalah :

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
- b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
- c. memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi;
- d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
- e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau

2.4 Koperasi dalam pandangan islam

a. Ayat-ayat yang berhubungan dengan koperasi

Koperasi disebut juga syirkah Ta'awuniyah (perseroan tolong-menolong). Dikaji dari segi definisinya koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam. Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka kekuatan ini digunakan untuk menegakkan suatu yang benar menurut syara'.

Dalam islam, Koperasi tergolong sebagai syirkah/syirkah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah,



Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah : 2).*

Di dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam ahmad dari anas bin malik R.A. berkata bahwa rasulallah SAW bersabda :

“Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan dianiaya, tapi bagaimana menolong orang yang dianiaya?

Rasul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya.” (HR. Imam bukhari dan Imam Ahmad)

Hadis tersebut tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas) maka dapat dipahami bahwa umat islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan

cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin. Seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membuang uang dan dengan cara yang lain-lain.

b. Ayat-ayat yang berhubungan dengan pembinaan

Artinya :Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat(91)Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.(92)(QS. An-nahl : 91-92)

Dengan ayat –ayat diatas kita ketahui bahwa al-qur'an sebagai sumber ajaran telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlunya pembinaan masyarakat,sehubungan dengan itu mengungkapkan istilah-istilah dalam al-qur'an yang ada hubungannya dengan konsep masyarakat, ciri-ciri masyarakat yang ideal menurut al-qur'an serta cara-cara yang ditempuh untuk membina masyarakat tersebut.

2.5 Defenisi Konsep

^ Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian,keadaan,kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singaribuan,1989 : 31)

1. Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
2. Pembinaan adalah suatu proses mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

2.6 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah istilah atau definisi yang menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variable sehingga menjadi factor-faktor yang dapat diukur.

Tabel Konsep Operasional : UU No.25 Tahun 1992 di sempurnakan dengan UU No.17 Tahun 2012

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Pembinaan Koperasi	1. Menciptakan dan mendorong pertumbuhan koperasi – koperasi di Kabupaten Kamapar	a. Memberikan usaha seluas-luasnya kepada koperasi, memprioritaskan bidang ekonomi yang diusahakan koperasi.
		b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi.
		c. Tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dengan badan usaha lainnya.
	2. Memberikan bimbingan, kemudahan,dan perlindungan kepada koperasi – koperasi di Kabupaten Kampar	a. Membimbing koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya
		b. Mengembangkan dan membantu pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan,pengembangan kelembagaan, pendidikan, dan penelitian koperasi
		c. Memperkokoh permodalan koperasi dan pembiayaan koperasi.
		d. Mengembangkan bidang usaha koperasi
		e. Memberi bantuan konsultasi guna membantu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, dengan tetap memperhatikan adnggaran dasar koperasi.

Sumber : UU No.25 Tahun 1992 dan UU No.17 Tahun 2012

